

**LAPORAN TAHUNAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
TAHUN 2019**

I. Pengantar

Dalam rangka memenuhi ketentuan regulator terkait pelaksanaan tata kelola terintegrasi, BRI sebagai Entitas Utama melakukan Pelaporan Tahunan atas Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 yang disusun sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015, Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit memuat:

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama 1 (satu) tahun buku;
2. Struktur Konglomerasi Keuangan dan struktur konglomerasi yang lebih luas, dalam hal berbeda;
3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham LJK dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir;
4. Struktur kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan; dan
5. Kebijakan transaksi intra-grup yang paling sedikit memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi transaksi intra-grup.

II. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

Periode	Peringkat	Keterangan
Penilaian Semester I Tahun 2019	2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
Penilaian Semester II Tahun 2019	2	

Hasil Analisa

Struktur	Aspek struktur tata kelola terintegrasi di Konglomerasi Keuangan BRI telah dilaksanakan secara memadai dengan terbentuknya Komite Tata Kelola Terintegrasi yang didukung oleh Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko serta didukung oleh Unit Kerja Subsidiary Management. Selain itu Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi telah menjadi pedoman kerja untuk Entitas Utama dan Entitas Anak dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan BRI
Proses	Aspek proses tata kelola terintegrasi telah dilaksanakan dengan baik, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan. BRI secara kontinyu dan konsisten melakukan review dan evaluasi dalam upaya peningkatan efektifitas tugas dan tanggung jawab masing-masing organ tata kelola terintegrasi tersebut.
Hasil	Aspek hasil tata kelola terintegrasi telah dilaksanakan dengan baik. seluruh anggota Konglomerasi Keuangan BRI telah menjalankan tugas melalui organ-organ tata kelola, dan mendokumentasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

III. Struktur Konglomerasi Keuangan BRI dan Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan

Struktur Konglomerasi Keuangan dan Struktur Kepemilikan Saham Konglomerasi Keuangan BRI



Perusahaan Anak				
Nama Perusahaan	Bisnis	Tanggal Investasi BRI	% Kepemilikan BRI	Alamat
BRI Syariah	Bank Syariah	19/12/2007	73%	Jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta
BRI Agro	Bank Komersial	03/03/2011	87.10%	Gedung BRI Agro Jl. Warung Jati Barat No. 139 Jakarta 12740
BRI Life	Asuransi	29 /12/2015	91%	Graha Irama Lt 2,5,7,11 & 15, Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav 1&2, Jakarta
BRI Finance	Financing	30/09/2016	99.78%	Lippo Kuningan, Lantai 1 Jl. HR Rasuna Said Kav.B-12, Karet Kuningan, Jakarta Selatan
BRI Ventures	Modal Ventura	20/12/2018	99.97%	District 8 Office, Prosperity Tower Lt 16 Unit F, SCBD Lot 28 Jl Jend Sudirman Kav 52-53 Senayan Kebayoran Baru Jakarta 12190
Danareksa Sekuritas	Perusahaan Efek	21/12/2018	67.00%	Gedung BRI II Lantai 23 Jl Jend Sudirman No 44 – 46 Jakarta 10210
BRINS	Perusahaan Asuransi Umum	26/09/2019	90.00%	Graha BRINS Jl. Mampang Prapatan Raya No 18 Jakarta Selatan 12790

IV. Struktur kepengurusan pada BRI sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan Posisi 31 Desember 2019

A. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Struktur Kepengurusan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(Posisi 31 Desember 2019)

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama/Komisaris Independen	Andrinof A. Chaniago
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris	-
Komisaris Independen	A. Fuad Rahmany
Komisaris Independen	A. Sonny Keraf
Komisaris Independen	Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen	Hendrikus Ivo
Komisaris	Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris	Hadiyanto
Komisaris	Loeke Larasati Agoestina*

*Menunggu Fit and Proper Test OJK

Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Sunarso
Wakil Direktur Utama	Catur Budi Harto
Direktur Keuangan	Haru Koesmahargyo
Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah	Priyastomo
Direktur Digital, Teknologi Informasi & Operasi	Indra Utoyo
Direktur Bisnis Mikro	Supari
Direktur Konsumer	Handayani
Direktur Human Capital	Herdy Rosadi Harman
Direktur Jaringan & Layanan	Ahmad Solichin Lutfiyanto
Direktur Hubungan Kelembagaan & BUMN	Agus Noorsanto
Direktur Manajemen Risiko	Agus Sudiarto
Direktur Kepatuhan	Azizatun Azhimah

B. PT Bank BRISyariah Tbk

Struktur Kepengurusan PT Bank BRISyariah
(Posisi 31 Desember 2019)

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Parman Nataatmadja*
Komisaris Independen	Eko Suwardi
Komisaris Independen	Ernie Tisnawati Sule*
Komisaris	Sutanto

*Menunggu Fit and Proper Test OJK

Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Ngatari*
Direktur	Kokok Alun Akbar
Direktur	Fidri Arnaldy
Direktur	Fahmi Subandi
Direktur	Yana Soeprianan*

*Menunggu Fit and Proper Test OJK

Dewan Pengawas Syariah	
Jabatan	Nama
Ketua Dewan Pengawas Syariah	KH. Didin Hafidhuddin
Anggota Dewan Pengawas Syariah	M. Gunawan Yasni

C. PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk

Struktur Kepengurusan PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
(Posisi 31 Desember 2019)

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Plt. Komisaris Utama / Komisaris Independen	Anna Maria Tjiadarma

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris	I.B.K. Suamba Manuaba*
Komisaris Independen	A.Y. Soepadmo

*Menunggu Fit and Proper Test OJK

Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Ebeneser Girsang
Direktur	Sigit Murtiyoso
Direktur	Bambang Krisminarno
Direktur	Herry Prayudi

D. PT Asuransi BRI Life

Struktur Kepengurusan PT Asuransi BRI Life
(Posisi 31 Desember 2019)

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Tri Wintarto
Wakil Komisaris Utama	Sapto Haryono Wahyu S.
Komisaris	Siswarin Dwi Hendarsapti
Komisaris Independen	Mulabasa Hutabarat
Komisaris Independen	M. Ridwan Rizqi R. Nasution
Komisaris Independen	Eko Wahyu Andriastono

Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Gatot Mardiwastiso Trisnadi
Direktur	Sugeng Sudibjo
Direktur	Khairi Setiawan
Direktur	Ansar Arifin
Direktur	Danny Cahya Rukmana
Direktur	Anik Hidayati

Dewan Pengawas Syariah	
Jabatan	Nama
Dewan Pengawas Syariah	KH. DR.Mohamad Hidayat, MBA, MH
Dewan Pengawas Syariah	Ir. H. Agus Haryadi.AAAIJ, FIIS
Dewan Pengawas Syariah	Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH

E. PT BRI Multifinance Indonesia

Struktur Kepengurusan PT BRI Multifinance Indonesia
(Posisi 31 Desember 2019)

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	I Komang Sudiarsa
Komisaris	Ngalim Sawega
Komisaris Independen	Boyke Budiono

Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Wisto Prihadi
Direktur	Handayatni Ariefiana H.
Direktur	Achmad Chairul Gani
Direktur	Willy Halim Sugiardi

F. PT BRI Ventures

Struktur Kepengurusan PT BRI Ventures
(Posisi 31 Desember 2019)

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Hadi Susanto
Komisaris	I Nyoman Sugiri Yasa

Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Nicko Widjaja
Direktur	-

G. PT Danareksa Sekuritas

Struktur Kepengurusan PT Danareksa Sekuritas
(Posisi 31 Desember 2019)

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	-
Komisaris	Soehandjono
Komisaris Independen	-

Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	-
Direktur	Budi Susanto
Direktur	-
Direktur	Santri Suryandari
Direktur	Boumediene Samurung Halomoan

H. PT Asuransi Bringin Sejahtera Arta Makmur

Struktur Kepengurusan PT Asuransi Bringin Sejahtera Arta Makmur
(Posisi 31 Desember 2019)

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Siswanto
Komisaris Independen	Alfonso Napitupulu
Komisaris Independen	Imam Sundoro

Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Tri Wintarto
Direktur	Achmad Chumaidi
Direktur	Sutarno
Direktur	Adi Setianto
Direktur	Ade Zulfikar

V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mitigasi Transaksi Intra-Grup

Hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan di berbagai sektor keuangan menyebabkan dampak secara langsung atau tidak langsung terhadap eksposur risiko yang timbul dalam kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan. Kebijakan Transaksi Intra-Grup BRI berpedoman pada POJK Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Bank BRI sebagai Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan wajib mengidentifikasi, mengelola dan memitigasi terhadap risiko transaksi intra group. Sesuai Surat Edaran S.04-DIR/DMR/03/2017 tentang Prosedur Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (*Risk Based Bank Rating*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., pengelolaan risiko transaksi intra-grup dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pengertian Risiko Transaksi Intra-Group

Risiko transaksi intra-grup adalah Risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

B. Pemantauan Transaksi Intra Group

Total transaksi intra group terhadap total asset, dihitung semua transaksi on balance sheet (*borrow and placement money market*) baik dari BRI ke Perusahaan Anak ataupun sebaliknya sebesar Rp22.17 Triliyun atau 1,65% dari total asset BRI.

C. Pengukuran Profil Risiko Terintegrasi

Proses penilaian profil Risiko terintegrasi merupakan penilaian terhadap 10 (sepuluh) jenis Risiko berdasarkan Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) terintegrasi. Kesepuluh jenis Risiko tersebut adalah Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategis, Risiko Kepatuhan, Risiko Transaksi Intra Grup dan Risiko Asuransi.

Pengukuran	Keterangan	Hasil Pengukuran
Risiko Inheren Terintegrasi	Dalam menilai Risiko Inheren atas Risiko transaksi intra-grup, parameter yang digunakan antara lain: a. Komposisi Transaksi intra-grup dalam	Low Low to Moderate Moderate Moderate to High

Pengukuran	Keterangan	Hasil Pengukuran
	Konglomerasi Keuangan. b. Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi. c. Informasi lainnya.	<i>High</i>
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar meliputi: a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Manajemen Risiko c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh	Peringkat 1 (<i>strong</i>) Peringkat 2 (<i>satisfactory</i>) Peringkat 3 (<i>fair</i>) Peringkat 4 (<i>marginal</i>) Peringkat 5 (<i>unsatisfactory</i>)

D. Peringkat Tingkat Risiko

Peringkat tingkat risiko terintegrasi merupakan kombinasi antara hasil pengukuran risiko inheren dan pengukuran kualitas penerapan manajemen risiko. Penetapan tingkat Risiko dilakukan dengan mengacu pada Matriks Tingkat Risiko berikut:

Peringkat Faktor Profil Risiko	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Fair</i>	<i>Marginal</i>	<i>Unsatisfactory</i>
Low	1	1	2	3	3
Low to Moderate	1	2	2	3	4
Moderate	2	2	3	4	4
Moderate to High	2	3	4	4	5
High	3	3	4	5	5

E. Upaya Pengelolaan Risiko Transaksi Intra Grup

1. Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
 - a. Direksi BRI membentuk Risk Management comitee Terintegrasi dan telah mengadakan Forum RMC Terintegrasi untuk membahas Risiko Intra-Group dan Kebijakan Risiko Intra-Group dalam Konglomerasi Keuangan BRI
 - b. Dewan Komisaris Entitas Utama bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan bertanggung jawab untuk:
 - b.1. Mengarahkan, menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - b.2. Mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala.

- c. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah mengadakan forum dengan Anak Perusahaan secara berkala untuk membahas Profil Risiko Intra-Group.
2. Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit
Terdapat Kebijakan yang telah mengatur tentang Manajemen Risiko Terintegrasi meliputi:
 - a. Surat Keputusan Nokep: S.72–DIR/DMR/12/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Kebijakan Umum Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 - b. Surat Edaran S.04-DIR/DMR/03/2017 tentang Prosedur Penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko (*Risk Based Bank Rating*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 21 Maret 2017 yang didalamnya mengatur Profil Risiko Intra-Group.
 - c. Surat Keputusan Nokep: 674-DIR/CDS/08/ 2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang *Risk Management Committee* (RMC) dan *Operational Risk Management Committee* (ORMC).
3. Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko
 - a. Identifikasi Risiko Intra-Group secara Terintegrasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi Konglomerasi Keuangan BRI.
 - b. Pengukuran Risiko Inheren Intra-Group dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Intra-Group melalui Laporan Profil Risiko Terintegrasi
 - c. Pemantauan dan Pengendalian Risiko melalui Forum Pembahasan Profil Risiko Perusahaan Anak yang dilaksanakan secara berkala untuk membahas Risk Issue Risiko Intra-Group dan rencana tindak lanjutnya
 - d. Proses manajemen risiko transaksi Intra-grup memadai. Dalam rangka pengendalian risiko transaksi intra-grup telah ditunjuk Divisi Investment Service sebagai Unit kerja yang melakukan pengelolaan terhadap anak perusahaan.
4. Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern
 - a. Efektivitas budaya Sadar Risiko Intra-Group pada Konglomerasi Keuangan BRI.
 - b. Pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) pada kualitas Penerapan Manajemen Risiko Intra-Group oleh Satuan Kerja Audit Internal dilakukan secara berkala minimal setahun sekali.

VI. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BRI

A. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

1. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris BRI adalah 8 (delapan) orang, terdiri dari 5 (lima) Komisaris Independen dan 3 (tiga) Komisaris. Jumlah anggota Dewan Komisaris BRI

tidak melebihi jumlah anggota Direksi BRI. Jumlah Komisaris Independen BRI adalah 56% dari jumlah anggota Dewan Komisaris BRI.

Susunan anggota Dewan Komisaris BRI periode 1 Januari 2019 sampai dengan 29 April 2019 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/ Independen
2	Gatot Trihargo	Wakil Komisaris Utama/Komisaris
3	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen
4	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen
5	Mahmud	Komisaris Independen
6	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen
7	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris
8	Hadiyanto	Komisaris

Susunan anggota Dewan Komisaris BRI periode 29 April 2019 sampai dengan 15 Mei 2019 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/ Independen
2	-	Wakil Komisaris Utama*
3	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen
4	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen
5	Mahmud	Komisaris Independen
6	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen
7	Jeffry J. Wurangian	Komisaris
8	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris
9	Hadiyanto	Komisaris

* Berdasarkan penunjukan Sdr. Gatot Trihargo sebagai Komisaris Pertamina, Ybs. tidak lagi menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama BRI

Susunan anggota Dewan Komisaris BRI periode 15 Mei 2019 sampai dengan 02 September 2019 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/ Independen
2	Wahyu Kuncoro	Wakil Komisaris Utama/Komisaris
3	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen
4	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen
5	Hendrikus Ivo	Komisaris Independen
6	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen
7	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris
8	Hadiyanto	Komisaris

Susunan anggota Dewan Komisaris BRI periode 02 September 2019 sampai dengan 18 November 2019 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/ Independen
2	Wahyu Kuncoro	Wakil Komisaris Utama/Komisaris
3	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen
4	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen
5	Hendrikus Ivo	Komisaris Independen
6	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen
7	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris
8	Hadiyanto	Komisaris
9	Loeke Larasati Agoestina*	Komisaris

*Ybs. efektif setelah dinyatakan lulus fit & proper test OJK

Susunan anggota Dewan Komisaris BRI periode 18 November 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/ Independen
2	-	Wakil Komisaris Utama/Komisaris*
3	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen
4	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen
5	Hendrikus Ivo	Komisaris Independen
6	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen
7	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris
8	Hadiyanto	Komisaris
9	Loeke Larasati Agoestina**	Komisaris

* Berdasarkan Penunjukan Sdr. Wahyu Kuncoro menjadi Wakil Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) pada tanggal 18 November 2019

** Ybs. efektif setelah dinyatakan lulus fit & proper test OJK

2. Jumlah dan Komposisi Direksi

Jumlah Direksi BRI melebihi jumlah yang dipersyaratkan oleh OJK sesuai POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yaitu sebanyak 3 (tiga) orang direksi.

Susunan Direksi BRI periode 22 Maret 2018 sampai dengan 03 Januari 2019 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Suprajarto	Direktur Utama
2	Haru Koesmahargyo	Direktur Keuangan
3	Kuswiyoto	Direktur <i>Corporate Banking</i>
4	Sis Apik Wijayanto	Direktur Hubungan Kelembagaan
5	Mohammad Irfan	Direktur Direktur Manajemen Risiko
6	R. Sophia Alizsa	Direktur <i>Human Capital</i>
7	Indra Utoyo	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi
8	Osbal Saragi Rumahorbo	Direktur Jaringan dan Layanan
9	Priyastomo	Direktur Direktur Mikro dan Kecil

No	Nama	Jabatan
10	Handayani	Direktur Konsumer
11	A. Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan
12	Supari	Direktur Retail dan Menengah

Susunan Direksi BRI periode 03 Januari 2019 sampai dengan 02 September 2019 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Suprajarto*	Direktur Utama
2	Sunarso	Wakil Direktur Utama
3	Haru Koesmahargyo	Direktur Keuangan
4	Priyastomo	Direktur Mikro& Kecil
5	Handayani	Direktur Konsumer
6	Mohammad Irfan	Direktur Manajemen Risiko
7	Sis Apik Wijayanto	Direktur Hubungan Kelembagaan
8	Indra Utoyo	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi
9	Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan
10	Supari	Direktur Retail dan Menengah
11	R. Sophia Alizsa	Direktur Human Capital
12	Osbal Saragi Rumahorbo	Direktur Jaringan dan Layanan

*Ybs. Efektif s/d 28 Agustus 2019

Susunan Direksi BRI periode 02 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Sunarso	Direktur Utama
2	Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama
3	Haru Koesmahargyo	Direktur Keuangan
4	Priyastomo	Direktur Bisnis Kecil, Ritel & Menengah
5	Indra Utoyo	Direktur Digital, Teknologi Informasi & Operasi
6	Supari	Direktur Bisnis Mikro
7	Handayani	Direktur Konsumer
8	Herdy Rosadi Harman	Direktur Human Capital
9	Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Jaringan & Layanan
10	Agus Noorsanto	Direktur Hubungan Kelembagaan & BUMN
11	Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko
12	Azizatun Azhimah	Direktur Kepatuhan

B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
- b. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;

- c. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
 - d. Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
 - e. Mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;
 - f. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
 - g. memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
 - h. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
 - i. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
 - j. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - k. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal; dan
 - l. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
 - b. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
 - c. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi;
 - d. Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
 - e. Menyusun Laporan Keuangan dalam angka 4 di atas berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
 - f. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan;
 - g. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan;

- h. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5, dan dokumen perseroan lainnya;
- j. Menyimpan di tempat kedudukan perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan serta dokumen perseroan lainnya;
- k. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;
- l. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
- m. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal berlaku;
- n. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
- o. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal berlaku;
- p. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

a. Komite Audit

i. Struktur, Keanggotaan dan Independensi Anggota Komite Audit

- i.1. Komite Audit berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- i.2. Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen.
- i.3. Susunan Komite Audit BRI Posisi 31 Desember Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Profesi
A. Fuad Rahmany	Ketua	Juni 2015-sekarang	Komisaris Independen
A. Sonny Keraf	Anggota	Juni 2015-sekarang	Komisaris Independen

Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Profesi
Rofikoh Rokhim	Anggota	Oktober 2017 - sekarang	Komisaris Independen
Hendrikus Ivo	Anggota	Oktober 2019- Sekarang	Komisaris Independen
Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	Februari 2016- sekarang	Pihak Independen
Sunuaji Noor Widiyanto	Anggota	Desember 2016- sekarang	Pihak Independen
Handayani	Anggota	Oktober 2019- Sekarang	Pihak Independen

- i.4. Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris maupun pemegang saham pengendali BRI dibuktikan dengan tandatangan pernyataan independen Anggota Komite Audit. Anggota Komite Audit juga bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari Perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI. Adapun kriteria independensi yang dipenuhi oleh anggota komite audit meliputi:
- i.4.1. Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 - i.4.2. Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 - i.4.3. Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 - i.4.4. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- ii. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
- ii.1. Laporan Keuangan
 - ii.1.1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada public dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;

- ii.1.2. Melakukan penelaahan bersama Manajemen SKAI dan Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP atas hasil audit termasuk kesulitan yang dihadapi;
- ii.1.3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP atas jasa yang diberikannya;
- ii.1.4. Melakukan penelaahan atas laporan tahunan untuk meyakinkan kecukupan, konsistensi dan keakuratan informasi.
- ii.2. Pengendalian Internal
Memonitor, menelaah dan mendiskusikan dengan Manajemen, SKAI dan Akuntan Publik atau Tim Audit dari KAP atas kecukupan dan efektifitas pengendalian internal atas laporan keuangan termasuk adanya kelemahan material, baik dalam rancangan maupun operasi, yang dapat mengganggu kemampuan Perseroan dalam mencatat, memproses, mengikhtisarkan dan melaporkan informasi keuangan.
- ii.3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
 - ii.3.1. Memantau dan mengkaji efektivitas kerja SKAI
 - ii.3.2. Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris untuk bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI.
 - ii.3.3. Melakukan penelaahan terhadap Laporan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi Audit Intern.
 - ii.3.4. Melakukan penelaahan terhadap setiap Laporan SKAI yang disampaikan kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit termasuk setiap laporan mengenai penyimpangan yang disampaikan kepada Direksi.
 - ii.3.5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh SKAI dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal.
- ii.4. Auditor Independen
 - ii.4.1. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, dengan memperhatikan independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
 - ii.4.2. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, agar mengusulkan ke RUPS, dalam hal Akuntan Publik dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS sebagaimana dimaksud di atas, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP pengganti dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

- ii.4.3. Dalam hal Komite Audit tidak dapat merekomendasikan Akuntan Publik dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada Dewan Komisaris sebelum RUPS sebagaimana dimaksud di atas, Komite Audit merekomendasikan pendelegasian kewenangan penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk.
- ii.4.4. Dalam menyusun rekomendasi sebagaimana dimaksud di atas, Komite Audit harus mempertimbangkan Independensi Akuntan Publik, KAP, dan orang dalam KAP; ruang lingkup audit; imbalan jasa audit; keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, KAP, dan Tim Audit dari KAP; metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP; manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian Akuntan Publik, KAP, dan Tim Audit dari KAP; Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
- ii.4.5. Menyampaikan rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik kepada Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan/ atau Pengurus DPLK untuk digunakan sebagai lampiran Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- ii.4.6. Mengusulkan pemberhentian Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP apabila dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.
- ii.4.7. Menelaah calon Akuntan Publik, atau Tim Audit dari KAP untuk entitas anak yang dikonsolidasi. KAP untuk entitas anak yang dikonsolidasi ditunjuk dan ditetapkan oleh entitas anak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya tetapi harus dikonsultasikan dengan Komite Audit untuk menilai aspek independensi calon Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP dan supervisi audit yang dijalankan oleh Komite Audit.
- ii.4.8. Memberikan persetujuan terlebih dahulu (*pre approval*) atas jasa non asurans yang akan ditugaskan kepada KAP.
- ii.4.9. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP paling sedikit melalui kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP dengan

standar audit yang berlaku; Kecukupan waktu pekerjaan lapangan; Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau KAP; dan hal lainnya.

ii.4.10. Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit kepada Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan/atau Pengurus DPLK BRI.

ii.5. Kepatuhan (*Compliance*)

ii.5.1. Memonitor efektivitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko *fraud* yang terkait dengan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting risks*) yang telah disiapkan dan dilaksanakan oleh Direksi.

ii.5.2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

ii.6. Pengaduan

Menelaah pengaduan baik yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, maupun pengaduan lainnya.

ii.7. Lain-Lain

ii.7.1. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.

ii.7.2. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

ii.7.3. Melaksanakan penugasan yang diminta oleh Komisaris.

iii. Frekuensi Rapat Komite Audit

Pada tahun 2019 Komite Audit telah melaksanakan 18 kali rapat dan seluruhnya telah memenuhi kuorum. Adapun rincian agenda rapat Komite sebagai berikut:

No	Agenda Rapat	Tanggal	Anggota Hadir	Ket.
1	Pembahasan Progress Report Audit atas Laporan Keuangan dan PKBL BRI Tahun 2019	17/01/2019	5	Kuorum
2	<i>Closing Meeting</i> Laporan Audit Keuangan & PKBL Tahun 2018	29/01/2019	5	Kuorum
3	Laporan Hasil Audit Triwulan IV Tahun 2018	26/02/2019	5	Kuorum
4	Pemberhentian dan pengangkatan Kepala SKAI BRI	12/03/2019	5	Kuorum
5	Closing Audit PKBL tahun 2018 & Laporan evaluasi kinerja manajemen	02/04/2019	5	Kuorum
6	Pembahasan Piagam Audit BRI, & Telaah atas Laporan Keuangan TW I Tahun 2019	23/04/2019	5	Kuorum
7	Rekomendasi Pengadaan KAP & Pembahasan Kepala SKAI	07/05/2019	5	Kuorum
8	Pembahasan Laporan Hasil Audit TW I Tahun 2019	13/05/2019	5	Kuorum
9	Pembahasan Calon Kepala SKAI	21/05/2019	6	Kuorum

No	Agenda Rapat	Tanggal	Anggota Hadir	Ket.
10	<i>Kick off meeting</i> audit laporan keuangan BRI 30 Juni 2019	28/05/2019	5	Kuorum
11	Pembahasan Laporan Hasil Audit Triwulan II Tahun 2019	29/07/2019	6	Kuorum
12	<i>Closing meeting</i> audit atas laporan keuangan BRI Triwulan II Tahun 2019 dengan EY	05/08/2019	6	Kuorum
13	<i>Progress Report</i> Audit atas Laporan Keuangan Interm BRI 31 Agustus 2019	08/10/2019	6	Kuorum
14	<i>Closing Meeting</i> Audit atas akun tertentu posisi 31 Agustus 2019	15/10/2019	7	Kuorum
15	Telaah Laporan Keuangan Triwulan III 2019	22/10/2019	7	Kuorum
16	Laporan Hasil Audit Triwulan III tahun 2019 & <i>Managemen Letter</i> tahun 2019	11/11/2019	7	Kuorum
17	Pembahasan perencanaan audit tahunan Tahun 2020	16/12/2019	7	Kuorum
18	Pembahasan perencanaan audit tahunan BRI Tahun 2019	16/12/2019	7	Kuorum

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit tahun 2019:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	A. Fuad Rahmany	Ketua	18	18	100%
2	A. Sonny Keraf	Anggota	18	16	89%
3	Rofikoh Rokhim	Anggota	18	18	100%
4	Hendrikus Ivo*	Anggota	6	6	100%
5	Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	18	18	100%
6	Sunuaji Noor Widiyanto	Anggota	18	18	100%
7	Handayani*	Anggota	6	6	100%

b. Komite Pemantau Risiko

i. Struktur, Keanggotaan dan Independensi Anggota Komite Pengawas Manajemen Risiko

- i.1. Keanggotaan KPMR BRI paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
- i.2. Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan harus memenuhi kriteria:
 - i.2.1. Memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan;
 - i.2.2. Memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan.

- i.3. Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko harus memenuhi kriteria:
- i.3.1. Memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko;
- ii.3.1. Memiliki pengalaman kerja paling kurang 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko di bidang keuangan dan/atau perbankan.
- i.4. Struktur dan Keanggotaan anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko posisi 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan pada Komite	Periode Jabatan	Keterangan/ Keahlian
1	Mahmud	Ketua	15 Maret 2017 - 15 Mei 2019	Komisaris Independen
2	Rofikoh Rokhim	Ketua	28 Mei 2019 - Sekarang	Komisaris Independen
3	Andrinof A. Chaniago	Anggota	15 Maret 2017 - Sekarang	Komisaris Utama/Independen
4	A. Fuad Rahmany	Anggota	Juni 2015 - Sekarang	Komisaris Independen
5	Hendrikus Ivo	Anggota	10 September 2019 - Sekarang	Komisaris Independen
6	Nicolaus T. Budi Harjanto	Anggota	15 Maret 2017 – Sekarang	Komisaris
7	Indrayeti	Anggota	1 Agustus 2014 - 10 Agustus 2019	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko
8	Tubagus A. Maulana	Anggota	1 Februari 2015 - 1 Februari 2019	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko
9	Sumaryo	Anggota	28 Mei 2019 - Sekarang	Pihak Independen Bidang Keuangan
10	Suindiyo	Anggota	1 Desember 2015 - Sekarang	Pihak Independen Bidang Keuangan

- i.5. Kriteria independensi yang dipenuhi oleh anggota komite pemantau manajemen risiko meliputi:
- i.3.1. Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- i.3.2. Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

- i.3.3. Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 - i.3.4. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 - ii. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko
 - ii.1. Mengevaluasi dan menganalisa secara berkala kecukupan kebijakan manajemen risiko dan memberikan pendapat berupa saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan kerangka kerja dan kebijakan manajemen risiko yang diperlukan;
 - ii.2. Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko Perseroan secara triwulanan dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan;
 - ii.3. Memantau dan mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Perseroan serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan manajemen risiko Perseroan;
 - ii.4. Melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko serta memberikan saran dan/ atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko. Evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko paling kurang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - ii.5. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan;
 - ii.6. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan pengendalian risiko terjadinya Fraud Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud Perseroan;
 - ii.7. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang Perseroan;

- ii.8. Mengevaluasi dan menganalisa penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Rencana Strategis Teknologi Informasi serta kebijakan Perseroan yang terkait penggunaan Teknologi Informasi paling kurang setiap semester dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Perseroan;
 - ii.9. Mengevaluasi dan menganalisa Tingkat Kesehatan Bank setiap semester dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memelihara Tingkat Kesehatan Bank;
 - ii.10. Mengevaluasi dan menganalisa paket usulan Direksi untuk penyediaan dana bagi pihak terkait yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris;
 - ii.11. Memberikan pendapat dan/atau rekomendasi atas pemberian kredit diatas jumlah tertentu yang memerlukan konsultasi dengan Dewan Komisaris;
 - ii.12. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- iii. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Manajemen

Selama tahun 2019, KPMR telah melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dan seluruhnya telah memenuhi kuorum. Adapun rincian agenda rapat komite sebagai berikut:

No	Agenda Rapat	Tanggal	Anggota Hadir	Ket.
1	Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2018	22 Januari 2019	6	Kuorum
2	1. Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2018, Pelaksanaan Fungsi 2. Kepatuhan Semester II Tahun 2018, Penerapan APU PPT Semester II 3. Tahun 2018, Strategi Anti Fraud Semester II Tahun 2018	8 Februari 2019	7	Kuorum
3	Mekanisme kontrol penghapusbukuan kredit/pinjaman	12 Maret 2019	6	Kuorum
4	Profil Risiko Triwulan I Tahun 2019	7 Mei 2019	8	Kuorum
5	Pembahasan <i>Potofolio Guide Line</i> dan Pengelolaan PEP.	25 Juni 2019	7	Kuorum
6	1. Usulan Ketua Pengganti Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) BRI 2. Permohonan Kredit Pihak Terkait PT BRI Finance (BRIF)	25 Juni 2019	7	Kuorum
7	Stress Test Portofolio kredit BRI	9 Juli 2019	6	Kuorum
8	Profil Risiko Triwulan II Tahun 2019	23 Juli 2019	7	Kuorum
9	Tingkat Kesehatan Bank, Fungsi Kepatuhan, APU PTT, Strategi Anti Fraud dan Kebijakan GCG BRI SM I Tahun 2019	6 Agustus 2019	6	Kuorum

No	Agenda Rapat	Tanggal	Anggota Hadir	Ket.
10	Stres Test Portofolio Asset Management BRI	24 September 2019	6	Kuorum
11	Restrukturisasi Kredit Bermasalah BRI	27 September 2019	7	Kuorum
12	Evaluasi Profil Risiko BRI Triwulan III Tahun 2019	29 Oktober 2019	7	Kuorum

Tingkat kehadiran rapat KPMR tahun 2019, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	Mahmud	Ketua	4	4	100
2	Rofikhoh Rokhim	Anggota/ Ketua	12	11	92
3	Andrinof A. Chaniago	Anggota	12	11	92
4	A. Fuad Rahmany	Anggota	12	10	83
5	Nicolaus T. Budi Harjanto	Anggota	12	12	100
6	Hendrikus Ivo	Anggota	3	3	100
7	Indrayeti	Anggota	8	7	88
8	Suindiyo	Anggota	12	11	92
9	Sumaryo	Anggota	12	12	100

c. Komite Nominasi dan Remunerasi

i. Struktur, Keanggotaan dan Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

- i. 1. Komite Nominasi dan Remunerasi BRI terdiri dari Ketua yang merupakan Komisaris Utama Independen dan anggota yang terdiri dari seluruh anggota Dewan Komisaris ditambah satu orang pejabat eksekutif satu tingkat di bawah Direksi yang menangani kebijakan SDM (ex officio).
- i. 2. Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi BRI periode 1 Januari 2019 sampai dengan 30 September 2019 adalah sebagai berikut

No	Nama	Jabatan	Profesi
1	Andrinof A. Chaniago	Ketua	Komisaris Utama/ Independen
2	Gatot Trihargo*	Anggota	Wakil Komisaris Utama
3	A. Fuad Rahmany	Anggota	Komisaris Independen
4	A. Sonny Keraf	Anggota	Komisaris Independen
5	Mahmud	Anggota	Komisaris Independen
6	Rofikoh Rokhim	Anggota	Komisaris Independen
7	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Anggota	Komisaris
8	Hadiyanto	Anggota	Komisaris
9	Busrul Imam	Anggota	Ex-officio (Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Human Capital)

*Efektif s/d tanggal 29 April 2019 sebagai Anggota Komisaris & KNR

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi BRI periode 30 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Profesi
1	Andrinof A. Chaniago	Ketua	Komisaris Utama/ Independen
2	Wahyu Kuncoro*	Anggota	Wakil Komisaris Utama
3	A. Fuad Rahmany	Anggota	Komisaris Independen
4	A. Sonny Keraf	Anggota	Komisaris Independen
5	Hendrikus Ivo	Anggota	Komisaris Independen
6	Rofikoh Rokhim	Anggota	Komisaris Independen
7	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Anggota	Komisaris
8	Hadiyanto	Anggota	Komisaris
9	Loeke Larasati A**	Anggota	Komisaris
10	E.R.A Taufiq	Anggota	<i>Ex-officio</i> (Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Human Capital)

*) Efektif s/d 18 November 2019 sebagai Anggota Komisaris & KNR

***) Efektif Setelah Lulus Fit And Proper Test OJK

- i. 3. Anggota KNR tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya maupun pemegang saham pengendali BRI dan Seluruh anggota KNR bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari Perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.
- ii. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi
 - ii.1. Fungsi Nominasi
 - ii.1.1. Menganalisa, menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris.
 - ii.1.2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris.
 - ii.1.3. Memantau pelaksanaan dan menganalisa kriteria dan prosedur seleksi bagi calon Pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
 - ii.1.4. Menyusun sistem penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
 - ii.1.5. Memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
 - ii.1.6. Memberikan pendapat atau nasehat kepada Direksi atas keputusan Direksi untuk mutasi dan/atau pengangkatan non pekerja Perseroan menjadi pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
 - ii.1.7. Menganalisa data pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang disampaikan oleh Direksi secara triwulan dan setiap waktu jika ada perubahan.
 - ii.1.8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko.

ii.2. Fungsi Remunerasi

- ii.2.1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja Perseroan.
- ii.2.2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - ii.2.2.1. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
 - ii.2.2.2. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pekerja Perseroan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- ii.2.3. Memberikan rekomendasi tentang pemberian opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja Perseroan, antara lain opsi saham.
- ii.2.4. Memberikan rekomendasi tentang sistem pensiun bagi Pekerja Perseroan.
- ii.2.5. Memberikan rekomendasi tentang sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam pengurangan Pekerja Perseroan.

iii. Frekuensi Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi yang diselenggarakan pada Tahun 2019 dan seluruhnya telah memenuhi kuorum. Adapun rincian agenda rapat komite sebagai berikut:

No	Agenda Rapat	Tanggal	Anggota Hadir	Ket.
1	Nominasi Pengurus BRI	3 Januari 2019	5	Kuorum
2	Nominasi calon pengurus BRI Life dan BRI Ventura	29 Januari 2019	7	Kuorum
3	Nominasi Pengurus BRI Syariah	2 April 2019	5	Kuorum
4	Wawancara calon direktur utama BRI Syariah	9 April 2019	5	Kuorum
5	1. Pembahasan Kebijakan Nominasi Pengurus Perusahaan Anak 2. Pembahasan Kebijakan Evaluasi Pengurus BRI 3. Pembahasan Hasil Evaluasi Kinerja Direksi BRI 4. Pembahasan Hasil Fit n Proper Test Calon Kepala SKAI	30 April 2019	6	Kuorum
6	Nominasi Calon Pengurus BRI	7 Mei 2019	6	Kuorum
7	Nominasi Pengurus BRI dalam RUPST BRI Tahun 2019	14 Mei 2019	7	Kuorum
8	Nominasi Pengurus BRI dalam RUPST BRI Tahun 2019	15 Mei 2019	7	Kuorum
9	Pembahasan Nominasi Pengurus BRI Agro, Pembahasan <i>Employee Stock Option</i> (ESOP), Pembahasan Tantiem Pembayaran Malus (Tantiem yg ditahan)	21 Mei 2019	7	Kuorum
10	Fit & Proper Test Calon Kepala Divisi SKP	2 Juli 2019	8	Kuorum

No	Agenda Rapat	Tanggal	Anggota Hadir	Ket.
11	Nominasi BRI Finance	2 Juli 2019	6	Kuorum
12	Evaluasi Kinerja BRI	16 Juli 2019	6	Kuorum
13	Pembahasan Evaluasi Kinerja Direksi BRI, Pembahasan Seleksi Calon Anggota Komite Non Komisaris BRI	23 Juli 2019	6	Kuorum
14	Pembahasan Talent Pool BRI	30 Juli 2019	5	Kuorum
15	Seleksi dan Wawancara Calon Anggota Komite Non Komisaris	31 Juli 2019	7	Kuorum
16	Nominasi Pengurus BRI dalam RUPSLB BRI Tahun 2019	30 Agustus 2019	8	Kuorum
17	Nominasi Pengurus BRI dalam RUPSLB BRI Tahun 2019	2 September 2019	8	Kuorum
18	Fit and Proper Test Pengurus PT Danareksa Sekuritas	17 September 2019	7	Kuorum
19	Review Kebijakan Ketenagakerjaan & Remunerasi Pekerja BRI	1 Oktober 2019	7	Kuorum
20	Review Pengurus Perusahaan Anak	22 Oktober 2019	6	Kuorum
21	Calon Kadiv SKP, Calon KPMR yang berasal dari non Komisaris	29 Oktober 2019	7	Kuorum
22	Pembahasan calon Kadiv SKP & anggota KPMR	19 November 2019	8	Kuorum
23	Pembahasan Pengrus BRINS, dan pending matters terkait tindaklanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	3 Desember 2019	7	Kuorum
24	Fit & Proper test calon Direktur Utama BRINS	10 Desember 2019	7	Kuorum

Tingkat Kehadiran Rapat KNR, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	Andrinof A. Chaniago	Ketua	24	22	92
2	Gatot Trihargo*	Anggota	17	13	76
3	Wahyu Kuncoro**	Anggota	14	11	79
4	A. Fuad Rahmany	Anggota	24	24	100
5	A. Sonny Keraf	Anggota	24	24	100
6	Mahmud	Anggota	8	8	100
7	Rofikoh Rokhim	Anggota	24	22	92
8	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Anggota	24	21	88
9	Hadiyanto	Anggota	24	19	79
10	Hendrikus Ivo	Anggota	17	17	100
11	E.R.A Taufiq	Anggota	17	14	82

*) Efektif s/d tanggal 29 April 2019 sebagai Anggota Komisaris & KNR

***) Efektif s/d 18 November 2019 sebagai Anggota Komisaris & KNR

d. Komite Tata Kelola Terintegrasi

i. Struktur, keanggotaan, dan independensi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi:

- i.1. Komite berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris Entitas Utama dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.
- i.2. Anggota KTKT paling kurang terdiri dari 1 (satu) Komisaris dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan BRI, seorang Pihak Independen, dan anggota Dewan Pengawas Syariah.
- i.3. Anggota Komite paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen dari Entitas Utama sebagai ketua merangkap anggota; Komisaris Independen dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan BRI sebagai anggota; Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan Komite Tata Kelola Terintegrasi; dan Anggota Dewan Pengawas Syariah dari BRI Syariah sebagai anggota.
- i.4. Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI posisi 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Profesi
1	Mahmud*	Ketua	15 Maret 2017 - 15 Mei 2019	Komisaris Independen
2	Rofikoh Rokhim	Ketua	21 Mei 2019 - Sekarang	Komisaris Independen
3	Andrinof A. Chaniago	Anggota	19 Juli 2017 - Sekarang	Komisaris Utama/ Independen
4	Wahyu Kuncoro	Anggota	10 Agustus 2019 - 18 November 2019	Wakil Komisaris Utama
5	Hendrikus Ivo	Anggota	10 Agustus 2019 - Sekarang	Komisaris Independen
6	Hadiyanto	Anggota	21 September 2018 - Sekarang	Komisaris
7	Heru Sukanto	Anggota	19 Mei 2015 - 26 Juni 2019	Komisaris Utama/Independen PT BRI Agroniaga Tbk
8	Hermanto Siregar	Anggota	7 Agustus 2018 - 29 April 2019	Komisaris Utama/ Independen PT Bank BRI Syariah Tbk
9	Eko Suwardi	Anggota	21 Mei 201 - Sekarang	Komisaris Independen PT Bank BRI Syariah Tbk
10	M. Gunawan Yasni	Anggota	19 Mei 2015 - Sekarang	Anggota Pengawas Syariah PT Bank BRI Syariah Tbk

No	Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Profesi
11	Mulabasa Hutabarat	Anggota	September 2017 - November 2019	Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera
12	Boyke Budiono	Anggota	27 Maret 2017 - Sekarang	Komisaris Independen PT BRI Multifinance Indonesia
13	Suindiyo	Anggota	10 Agustus 2019 - Sekarang	Pihak Independen
14	Indrayeti	Anggota	19 Mei Juni 2015 - 10 Agustus 2019	Pihak Independen
15	Tubagus A. Maulana	Anggota	19 Mei Juni 2015 - 1 Februari 2019	Pihak Independen

*) Efektif sampai 15 Mei 2019

- i.5. Untuk menjamin independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pandangan maupun saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, anggota KTKT yang independen tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya maupun pemegang saham pengendali BRI dan bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari Perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.
- ii. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi
 - ii.1. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian intern, pelaksanaan fungsi kepatuhan dan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi;
 - ii.2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk Penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi bila dianggap perlu;
 - ii.3. Memberikan masukan strategis kepada Dewan Komisaris BRI untuk disampaikan kepada Direksi BRI terkait pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
 - ii.4. Menyampaikan hasil evaluasi Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (*Self Assessment*) setiap semester kepada Direksi BRI.
 - ii.5. Menyampaikan hasil evaluasi Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi BRI.
- iii. Frekuensi Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi
 - iii.1. Pada tahun 2019 KTKT telah melaksanakan 5 (lima) kali rapat dan seluruhnya telah memenuhi kuorum. Adapun rincian agenda rapat komite sebagai berikut:

No	Agenda Rapat	Tanggal	Anggota Hadir	Ket.
1	Profil Risiko Terintegrasi Semester II Tahun 2018, Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Semester II Tahun	14 Mei 2019	7	Kuorum

No	Agenda Rapat	Tanggal	Anggota Hadir	Ket.
	2018, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Semester II Tahun 2018, Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi			
2	Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi & Pengendalian Intern Terintegrasi Semester II tahun 2018	28 Mei 2019	8	Kuorum
3	Fungsi Kepatuhan & Pengendalian Intern Terintegrasi Semester I Tahun 2019	27 Agustus 2019	9	Kuorum
4	Evaluasi Profil Risiko Terintegrasi BRI Semester I Tahun 2019	29 Oktober 2019	10	Kuorum

iii.2. Tingkat Kehadiran Rapat KTKT tahun 2019, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	Mahmud*	Ketua	1	1	100
2	Rofikoh Rokhim	Ketua	4	4	100
3	Andrinof A. Chaniago	Anggota	4	4	100
4	Wahyu Kuncoro	Anggota	2	2	100
5	Hadiyanto	Anggota	1	1	100
6	Hendrikus Ivo	Anggota	2	2	100
7	Heru Sukanto	Anggota	2	2	100
8	Eko Suwardi	Anggota	3	3	100
9	M. Gunanan Yasni	Anggota	4	4	100
10	Mulabasa Hutabarat	Anggota	4	4	100
11	Boyke Budiono	Anggota	4	4	100
12	Indrayeti	Anggota	2	2	100
13	Suindiyo	Anggota	2	2	100

*) Efektif sampai 15 Mei 2019

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Manajemen Risiko Terintegrasi

a. Penerapan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi

Dalam rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 Tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Satuan Kerja kepatuhan Terintegrasi melakukan berbagai hal, antara lain:

- i. Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Konglomerasi Keuangan BRI akan disusun berdasarkan format yang telah ditetapkan oleh BRI sebagai Entitas Utama, dengan tetap mempertimbangkan struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK.

- ii. Aspek yang di evaluasi dalam Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan LJK Konglomerasi Keuangan BRI, paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - ii.1. Pencegahan Penyimpangan Terhadap Ketentuan Kehati-hatian.
 - ii.2. Pemantauan terhadap Komitmen yang dibuat Bank.
 - ii.3. Pengelolaan Risiko Kepatuhan.
 - ii.4. Pemantauan Terhadap Prinsip Kehati-hatian.
 - ii.5. Perkembangan Pelaksanaan Program APU dan PPT.
 - ii.6. Evaluasi/Pemantauan Kepatuhan oleh Dewan Komisaris.
 - ii.7. Penerapan *Good Corporate Governance*.
 - ii.8. Penilaian *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BRI.
- b. Penerapan Fungsi Audit Intern Terintegrasi

Dalam rangka mendorong konglomerasi keuangan BRI memiliki fungsi audit intern yang handal sehingga dapat menjadi strategic business partner dalam mendukung tujuan perusahaan dalam konglomerasi keuangan dan untuk memastikan pelaksanaan audit intern di perusahaan anak dilakukan dengan menggunakan standar audit pada Bank, maka selama tahun 2019 SKAI Terintegrasi telah melaksanakan berbagai program kerja, antara lain:

 - i. Pengesahan Piagam Audit Intern Terintegrasi Konglomerasi Keuangan sebagai pedoman utama tata kelola secara terintegrasi yang harus dipatuhi oleh semua Satuan Kerja Audit Intern dalam Konglomerasi Keuangan BRI.
 - ii. Melaksanakan evaluasi terhadap fokus dan strategi audit SKAI Perusahaan Anak sebagaimana tercantum dalam Perencanaan Audit Tahunan (PAT) 2019 masing-masing LJK Konglomerasi Keuangan.
 - iii. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan fungsi audit intern secara berkala setiap Triwulanan dengan ruang lingkup pelaksanaan monitoring, sbb:
 - iii.1. Monitoring pencapaian kinerja Perusahaan Anak
 - iii.2. Monitoring Laporan Hasil Audit Perusahaan Anak
 - iii.3. Monitoring tindak lanjut temuan signifikan Perusahaan Anak
 - iii.4. Monitoring pemenuhan SDM Audit Perusahaan Anak
 - iv. Melaksanakan audit individual dalam hal pengadaan dan core banking serta audit non IT di BRI Life.
 - v. Melaksanakan joint audit dengan BRI Agro dan BRI Syariah (bidang IT dan Non IT).
 - vi. Melaksanakan Quality Assurance Review and Improvement Program (QAIP) di SKAI Perusahaan Anak dalam rangka mengembangkan dan memelihara program peningkatan kualitas audit yang mencakup seluruh aktivitas audit internal. QAIP yang dilaksanakan oleh SKAI Terintegrasi terhadap SKAI Perusahaan Anak dilaksanakan juga dalam rangka mengevaluasi kesesuaian aktivitas audit internal terhadap standar, kode etik Auditor dan menilai efisiensi serta efektivitas aktivitas audit internal untuk kemudian diidentifikasi peluang peningkatannya.

Selama tahun 2019, SKAI Terintegrasi telah melaksanakan Quality Assurance terhadap SKAI BRI Syariah dan BRI Life.

- vii. Penyelenggaraan pendidikan dengan melibatkan Auditor LJK Konglomerasi Keuangan BRI dengan materi sbb:
 - vii.1. Training Root Cause Analysis pada tanggal 20 – 22 Maret 2019.
 - vii.2. Training Audit Investigatif pada tanggal 25 – 29 Maret 2019.
 - vii.3. Training Implementasi PSAK 71 pada tanggal 10 – 11 Oktober 2019.
 - viii. Penyampaian Laporan Audit Intern Terintegrasi setiap semester.
 - ix. Pelaksanaan Self Assessment Tata Kelola Terintegrasi setiap semester. Hasil penilaian sendiri terhadap Faktor 5 Indikator Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi baik meliputi aspek struktur, proses dan hasil adalah 1 (sangat baik). Atas penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum SKAI Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI telah melakukan penerapan tata kelola terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal tersebut tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan tata kelola terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan tata kelola terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
 - x. Dalam rangka akselarasi proses transfer knowledge dari SKAI BRI kepada SKAI Perusahaan Anak, telah ditempatkan Auditor BRI di SKAI Perusahaan Anak dengan rincian sebagai berikut:
 - x.1. BRI Agro : Kepala SKAI (1 Orang), Wakil Kepala SKAI (1 Orang), Auditor TI (1 Orang), Auditor (2 Orang).
 - x.2. BRI Life : KTA (1 Orang), 3 (tiga) Orang Auditor.
 - x.3. BRI Finance : 2 orang Auditor.
- c. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi
- Pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi di BRI meliputi 4 tahapan yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan manajemen risiko tersebut dilakukan terhadap seluruh faktor (kualitatif dan kuantitatif) yang berdampak secara signifikan terhadap kondisi keuangan Konglomerasi Keuangan BRI.
- Dalam menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi, BRI sebagai entitas utama memastikan pengelolaan risiko melalui hal-hal sebagai berikut:
- i. Penetapan Limit Risiko Terintegrasi
- Penyusunan limit dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari anggota Konglomerasi Keuangan BRI. Penetapan limit risiko mencakup limit secara keseluruhan, limit setiap jenis risiko dan limit setiap anggota Konglomerasi Keuangan yang memiliki eksposur risiko. Limit risiko tersebut akan direview secara berkala oleh Divisi *Enterprise Risk & Portofolio Management* BRI terhadap perubahan kondisi yang terjadi. Divisi *Enterprise Risk & Portofolio Management* BRI menyampaikan hasil pemantauan limit secara berkala kepada Direksi BRI atau *Risk Management Committee* (RMC).

- ii. Laporan Profil Risiko Terintegrasi
Laporan Profil Risiko Terintegrasi disusun setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, disajikan secara komparatif dengan posisi semester sebelumnya. Peringkat profil risiko konglomerasi keuangan BRI posisi Desember 2019 adalah *Low to Moderate*.
- iii. Kecukupan Permodalan Konglomerasi Keuangan
Kecukupan permodalan dilakukan melalui pemantauan profil risiko dan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terintegrasi. BRI menyusun dan melaporkan Laporan Perhitungan KPMM Terintegrasi kepada OJK setiap semester. Rasio KPMM Terintegrasi konsolidasi BRI dan Perusahaan Anak posisi Desember 2019 sebesar 241.28%. Nilai Rasio KPMM Terintegrasi tersebut berada di atas batas minimum ketentuan sebesar 100%.
- iv. Manajemen Likuiditas Konsolidasi
Posisi *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) BRI secara Konsolidasi posisi Desember 2019 sebesar 227.12%.
- v. Pemantauan Transaksi Intra Grup
Total transaksi intra group terhadap total asset, dihitung semua transaksi on balance sheet (*borrow and placement money market*) baik dari BRI ke Perusahaan Anak ataupun sebaliknya sebesar Rp22.17 triliun atau 1,65% dari total asset BRI.
- vi. Pelaksanaan *Risk Management Committee* (RMC) Terintegrasi
Risk Management Committee (RMC) Terintegrasi adalah komite tertinggi dalam sistem manajemen risiko Konglomerasi Keuangan BRI. Pada tahun 2019, BRI telah melaksanakan RMC Terintegrasi sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 29 Mei 2019 dan 12 Desember 2019.

5. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BRI

Kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi tidak ada yang melebihi 5% dari total saham sebagaimana tercatat Biro Administrasi Efek. Adapun rincian kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi BRI posisi 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Kepemilikan			
		31 Des 2018		31 Des 2019	
		Lembar Saham	%	Lembar Saham	%
Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	-	-	-	-
A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	-	-	-	-
A. Sony Keraf	Komisaris Independen	-	-	-	-

Nama	Jabatan	Kepemilikan			
		31 Des 2018		31 Des 2019	
		Lembar Saham	%	Lembar Saham	%
Mahmud	Komisaris Independen	-	-	-	-
Rofikoh Rohim	Komisaris Independen	-	-	-	-
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	-	-	-	-
Loeke Larasati Agoestina	Komisaris	-	-	-	-
Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	188.700	0,00015	386.700	0,0003135
Hadiyanto	Komisaris	-	-	201.200	0,0001631

b. Kepemilikan saham anggota Direksi

Nama	Jabatan	Kepemilikan			
		31 Des 2018		31 Des 2019	
		Lembar Saham	%	Lembar Saham	%
Sunarso	Direktur Utama	-	-	-	-
Catur Budi Harso	Wakil Direktur Utama	-	-	-	-
Haru Koesmahargyo	Direktur	528.700	0,00043	944.400	0,00077
Priyastomo	Direktur	528.700	0,00043	944.400	0,00077
Indra Utoyo	Direktur	419.500	0,00034	835.200	0,00068
Supari	Direktur	-	-	351.100	0,00028
Handayani	Direktur	106.600	0,00003	522.300	0,00042
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur	585.000	0,00047	928.200	0,00075
Herdy Rosadi Harman	Direktur	-	-	-	-
Agus Noorsanto	Direktur	-	-	46.800	0,000037
Agus Sudiarto	Direktur	-	-	-	-
Azizatun Azhimah	Direktur	-	-	25.100	0,00000

C. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali

1. Dewan Komisaris

Selama periode Tahun 2019 terdapat 4 (empat) Dewan Komisaris yang memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali, namun tidak terdapat hubungan keluarga dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	BOC		BOD		Pemegang Saham Pengendali		BOD		BOC		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Andrinof A. Chaniago		√		√		√		√		√		√
Gatot Trihargo*		√		√	√			√		√		√
A. Fuad Rahmany		√		√		√		√		√		√
A. Sonny Keraf		√		√		√		√		√		√
Mahmud**		√		√		√		√		√		√
Rofikoh Rokhim		√		√		√		√		√		√
Nicolaus teguh Budi Harjanto		√		√	√			√		√		√
Hadiyanto		√		√	√			√		√		√
Wahyu Kuncoro***		√		√	√			√		√		√
Hendrikus Ivo****		√		√		√		√		√		√
Loeke Larasati Agoestina*****		√		√		√		√		√		√
*) Efektif sampai dengan 29 April 2019 **) Efektif sampai dengan 15 Mei 2019 ***) Diangkat dalam RUPST 15 Mei 2019, efektif sampai dengan 18 November 2019 ****) Diangkat dalam RUPST 15 Mei 2019 *****) Diangkat dalam RUPSLB 2 September 2019												

2. Direksi

Selama periode Tahun 2019 tidak terdapat Direksi BRI yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	BOD		BOC		Pemegang Saham Pengendali		BOD		BOC		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Sunarso		√		√		√		√		√		√
Catur Budi Harso*		√		√		√		√		√		√
Haru Koesmahargyo		√		√		√		√		√		√
Priyastomo		√		√		√		√		√		√
Indra Utoyo		√		√		√		√		√		√
Handayani		√		√		√		√		√		√
Supari		√		√		√		√		√		√
Ahmad Solichin Lutfiyanto		√		√		√		√		√		√
Herdy Rosadi Harman*		√		√		√		√		√		√
Agus Noorsanto*		√		√		√		√		√		√
Agus Sudiarto*		√		√		√		√		√		√
Azizatul Azhimah*		√		√		√		√		√		√
Suprajarto**		√		√		√		√		√		√
Mohammad Irfan**		√		√		√		√		√		√
Sis Apik Wijayanto**		√		√		√		√		√		√
R. Sophia Alizsa**		√		√		√		√		√		√

*) Diangkat dalam RUPSLB 2 September 2019

***) Efektif sampai dengan tanggal 2 September 2019

D. Jumlah Pelanggaran Kode Etik Tahun 2019

Selama tahun 2019 terdapat 283 kasus pelanggaran Kode Etik di BRI.

E. Permasalahan Hukum

Perkara hukum material yang dihadapi oleh BRI pada tahun 2019 sebanyak 457 perkara dengan rincian sebagai berikut:

1. Perkara Kredit (Penundaan Lelang Agunan): 336 perkara (73,52%)
2. Perkara kredit (Non Lelang Agunan): 83 perkara (18,16%)
3. Perkara Operasional & Jasa: 27 perkara (5,91%)
4. Perkara Support (SDM, Logistik, dll): 10 perkara (2,19%)
5. Perkara Treasury, Trade Finance & IT: 1 perkara (0,22%)

Total Perkara yang telah memperoleh Keputusan Hukum yang tetap/berstatus (*Inkracht Van Gewijsde*) adalah sebanyak 158 perkara.

F. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

BRI memiliki kebijakan internal yang mengatur mengenai pengelolaan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan di BRI. Kebijakan dimaksud tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No.02-KOM/BRI/05/2012 dan Nokep S.104-DIR/DKP/05/2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

1. Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris
Anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan dalam transaksi dan/atau aksi korporasi wajib menyatakan benturan kepentingan dan dirinya tidak dapat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan terkait transaksi dan/atau aksi korporasi tersebut. Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen sebelum transaksi tersebut dilaksanakan. Pada tahun 2018 tidak terdapat transaksi atau aksi korporasi BRI yang mengandung benturan kepentingan dan dilakukan oleh Dewan Komisaris.
2. Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi
Masing-masing anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan dalam transaksi dan/atau aksi korporasi wajib menyatakan benturan kepentingan dan dirinya tidak dapat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan terkait transaksi dan/atau aksi korporasi tersebut. Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Komisaris Independen dan pemegang saham independen sebelum transaksi tersebut dilaksanakan. Pada tahun 2018 tidak terdapat transaksi atau aksi korporasi BRI yang mengandung benturan kepentingan.

G. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial

Tanggung jawab sosial Bank BRI terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan diwujudkan dalam bentuk Program Bina Lingkungan (BL) yang disebut dengan Program BRI Peduli. Tanggung jawab sosial ini merupakan komitmen Bank BRI untuk berperan serta dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang diselaraskan dengan kegiatan operasional bisnis perusahaan.

Hingga akhir Desember 2019, dana yang disalurkan melalui program bina lingkungan (BL) mencapai Rp226,58 miliar, meningkat sebanyak 38.47% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp163,63 miliar. Dana tersebut disalurkan melalui berbagai program BRI Peduli yaitu:

Sektor	2018	%	2019	%
Indonesia Peduli	6.845.484.366	4,18	6.336.123.862	2,80
Indonesia Cerdas	53.087.712.848	32,44	70.191.707.124	30,98
Indonesia Sehat	22.384.597.948	13,68	44.759.761.982	19,75

Sektor	2018	%	2019	%
Indonesia Membangun	22.895.422.555	13,99	29.302.833.387	12,93
Indonesia Taqwa	27.404.110.789	16,75	43.785.086.953	19,32
Indonesia Lestari	722.965.000	0,44	866.344.000	0,38
Indonesia Sejahtera	30.294.264.189	18,51	31.342.001.612	13,83
Total	163.634.557.695	100,00	226.583.858.920	100

H. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK/ 2017 tanggal 17 Maret 2017

Periode	Peringkat	Keterangan
Penilaian Tahun 2019	2	Mencerminkan Manajemen BRI telah melakukan penerapan Good Corporate Governance pada aspek <i>governance structure</i> , <i>governance process</i> , dan <i>governance outcome</i> yang secara umum Baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Hasil Analisis:

Implementasi *Good Corporate Governance* di BRI dalam rangka mendukung keberlanjutan usaha BRI dengan melaksanakan kegiatan usaha yang mencerminkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* telah memadai. Hal tersebut dapat digambarkan dalam penerapan *Good Corporate Governance* pada aspek *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* yang ada di BRI.

1. Governance Structure

Aspek struktur tata kelola (*Governance Structure*) di BRI telah dilaksanakan secara memadai dengan terbentuknya struktur organisasi terdiri dari organ utama dan organ pendukung perusahaan, ketersediaan rencana bisnis, kebijakan, dan prosedur dalam pelaksanaan GCG.

2. Governance Process

Aspek proses tata kelola (*Governance Process*) telah dilaksanakan dengan baik, setiap organ perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan. BRI secara kontinyu dan konsisten melakukan review dan evaluasi dalam upaya peningkatan efektifitas tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan

3. Governance Outcome

Aspek hasil tata kelola (*Governance Outcome*) telah dilaksanakan dengan baik. Pengungkapan & transparansi informasi dilakukan secara memadai dan tidak adanya pelanggaran BPMK. Bank BRI secara kontinyu melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem informasi manajemen dan sistem pelaporan BRI dalam rangka peningkatan kualitas informasi yang diberikan kepada stakeholders.